

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN SEKUTU

Lely Wahyu Ningrat¹, Faridi

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

lelywningrat@gmail.com¹, faridi@umm.ac.id²

ABSTRACT

This article examines the dynamics of Islamic education in Indonesia during the arrival of the Allied Forces and the Netherlands Indies Civil Administration (NICA) in the period 1945-1949, a crucial phase in the early years of independence. The post-Proclamation political situation, marked by conflicts between the Republic of Indonesia, the Allied Forces, and the Dutch, had significant implications for the organization and development of Islamic education. Madrasahs, pesantren, and other Islamic educational institutions faced various challenges, ranging from strict supervision and limited institutional activities to threats of dissolution, as they were perceived as potentially supporting the national struggle. This study employs a qualitative approach using the historical method through library research on relevant primary and secondary sources. The findings indicate that the establishment of the Ministry of Religious Affairs in 1946 constituted an important milestone in the formal recognition of Islamic education as an integral part of the national education system. Furthermore, pesantren, madrasahs, and Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, and Perti played strategic roles in sustaining and strengthening Islamic education amid political pressure and military conditions. The period of 1945-1949 not only represented a phase of survival for Islamic education but also laid the foundational basis for institutional structures, curriculum development, and the consolidation of Islamic educational identity oriented toward religious values, nationalism, and national character building.

Keywords: Islamic education, political dynamics, Allied Forces and Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika pendidikan Islam di Indonesia pada masa kedatangan Sekutu dan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dalam kurun waktu 1945-1949, sebuah periode penting pada fase awal kemerdekaan. Kondisi politik pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh pertentangan antara Republik Indonesia, Sekutu, dan Belanda membawa implikasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Madrasah, pesantren, serta berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya menghadapi beragam tantangan, mulai dari pengawasan yang ketat, keterbatasan aktivitas kelembagaan, hingga ancaman pembubaran karena dinilai berpotensi mendukung perjuangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi momentum penting dalam pengakuan resmi negara terhadap pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, keberadaan pesantren, madrasah, serta organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Perti memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan penguatan pendidikan Islam di tengah tekanan politik dan situasi militer. Periode 1945-1949 tidak hanya menjadi fase mempertahankan eksistensi pendidikan Islam, tetapi juga menjadi landasan awal bagi pembentukan struktur kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan peneguhan identitas, pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, serta pembentukan karakter bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Dinamika Politik, Sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA)

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kedatangan Sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) tahun 1945-1949 menunjukkan capaian yang luar biasa di tengah tekanan politik dan militer yang berat. Madrasah dan pesantren yang berada di wilayah konflik tetap mampu mempertahankan aktivitas pembelajaran meskipun menghadapi pengawasan ketat, keterbatasan tenaga pendidik, dan ancaman pembubaran karena dianggap sebagai basis perlawanan nasional. Ketahanan kelembagaan ini membuktikan bahwa umat Islam Indonesia berhasil menjaga kesinambungan pendidikan keagamaan tanpa bergantung sepenuhnya pada stabilitas politik yang sedang bergejolak, bahkan di wilayah-wilayah yang dikuasai langsung oleh Sekutu dan NICA.

Keberhasilan ini semakin terlihat nyata dengan berdirinya Kementerian Agama pada Januari 1946, yang

menjadi bukti konkret bahwa pemerintah Republik Indonesia yang masih sangat muda mampu merumuskan kebijakan strategis di tengah kondisi serba terbatas. Pengakuan formal terhadap madrasah dan pesantren, penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum, hingga penyaluran bantuan tenaga pendidik dan dana operasional, seluruhnya terlaksana meskipun anggaran negara sangat minim dan sebagian besar wilayah masih dalam kondisi tidak stabil akibat pertempuran.

Peran pesantren, madrasah, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Perti pada periode ini juga menunjukkan hasil yang maksimal sebagai pusat konsolidasi sosial dan basis perjuangan. Kyai dan tokoh agama tidak hanya berhasil mempertahankan fungsi pendidikan, tetapi juga aktif menggerakkan masyarakat, menyalurkan bantuan logistik, dan menjaga semangat

nasionalisme di kalangan santri dan masyarakat luas. Kondisi lapangan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam pada masa Sekutu justru tumbuh menjadi instrumen ketahanan sosial politik, bukan sekadar institusi pengajaran semata.

Secara ideal, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli, pendidikan pada masa transisi politik dan konflik bersenjata seharusnya menghadapi disrupsi struktural yang serius sehingga sulit mencapai keberhasilan kelembagaan yang optimal. Iskandar et al. (2022) menekankan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan idealnya sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan asing yang cenderung membatasi ruang gerak lembaga keagamaan pribumi. Sejalan dengan itu, Bella et al. (2024) menyatakan bahwa transisi kekuasaan politik semestinya menciptakan kekosongan kebijakan yang berdampak pada terhambatnya penataan kelembagaan pendidikan secara sistematis. Fachrani et al. (2024) menambahkan bahwa pembentukan institusi negara baru pada masa awal kemerdekaan idealnya membutuhkan waktu konsolidasi yang panjang sebelum mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Khairiyyah (2025) juga menegaskan bahwa tekanan politik kolonial secara ideal seharusnya melemahkan eksistensi lembaga pendidikan Islam secara signifikan, mengingat keterbatasan sumber daya dan legitimasi yang dimiliki pemerintah yang baru berdiri. Terakhir, Agustang et al. (2023)

berpendapat bahwa dinamika kebijaksanaan pendidikan pada masa perang kemerdekaan idealnya berjalan tersendat dan tidak merata, mengingat prioritas negara yang lebih terfokus pada aspek pertahanan dan diplomasi politik ketimbang penataan sektor pendidikan.

Kesenjangan yang muncul antara kondisi ideal menurut para pakar dan kenyataan di lapangan cukup mencolok. Secara teoritis, tekanan politik dan kekosongan kelembagaan pada masa transisi kekuasaan seharusnya melemahkan bahkan melumpuhkan pendidikan Islam, namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, yakni pendidikan Islam justru mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan mengalami penguatan kelembagaan melalui berdirinya Kementerian Agama serta konsolidasi peran pesantren, madrasah, dan organisasi Islam. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu di luar prediksi teori umum yang membuat pendidikan Islam pada masa Sekutu dan NICA mampu mencapai hasil yang jauh lebih optimal dibanding yang seharusnya terjadi menurut kondisi ideal.

Kesenjangan tersebut kemudian melahirkan masalah penelitian yang penting untuk dikaji lebih dalam, yaitu bagaimana kebijakan politik pendidikan Islam pada masa Sekutu justru mampu bertahan dan berkembang di tengah kondisi yang secara teoritis seharusnya menghambatnya. Dari masalah ini muncul pertanyaan penelitian: bagaimana bentuk kebijakan politik

pendidikan Islam yang diambil pemerintah Republik Indonesia pada masa kedatangan Sekutu dan NICA, serta bagaimana peran pesantren, madrasah, dan organisasi Islam dalam mempertahankan dan memperkuat pendidikan Islam di tengah tekanan politik pada periode tersebut?

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari berbagai sudut periode dan pendekatan. Sejumlah studi memfokuskan kajian pada masa pra-kemerdekaan dan kebijakan kolonial Belanda-Jepang, menyoroti bagaimana politik pendidikan pada masa itu membatasi ruang gerak lembaga Islam (Iskandar et al, 2022; Khairiyyah, 2025). Kajian lain menyoroti peran pesantren sebagai kekuatan perlawanan terhadap penjajah Barat, menekankan fungsi pesantren sebagai basis mobilisasi sosial dan spiritual masyarakat pribumi (Amin et al, 2023; Tharaba, 2020). Selain itu, terdapat pula penelitian yang menelusuri jejak historis kebijakan pendidikan Islam secara umum sepanjang lintasan sejarah Indonesia, memberikan gambaran makro tanpa berfokus pada periode transisi kekuasaan tertentu (Bella et al, 2024; Sari et al, 2020). Studi-studi lain lebih spesifik mengkaji periode pasca-kemerdekaan, termasuk pembentukan Kementerian Agama dan dinamika kelembagaan pendidikan Islam setelah tahun 1949 (Musadad, 2021; Nilawati et al, 2023; Fachrani et al, 2024; Agustang et al, 2023).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah pendidikan Islam di Indonesia, mayoritas kajian cenderung berfokus pada periode sebelum kemerdekaan atau setelah tahun 1949, sementara periode transisi 1945-1949 yang secara spesifik membahas interaksi antara kebijakan pendidikan Islam dengan kehadiran Sekutu dan NICA masih jarang dikaji secara mendalam dan terintegrasi (Iskandar et al, 2022; Bella et al, 2024; Musadad, 2021; Sari et al, 2020; Tharaba, 2020). Beberapa penelitian menyinggung peran pesantren dalam perlawanan fisik terhadap penjajah, namun belum secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan politik formal pemerintah Republik Indonesia—melalui pembentukan Kementerian Agama dan penataan kurikulum—berinteraksi dengan dinamika politik Sekutu-NICA pada periode krusial tersebut (Amin et al, 2023; Khairiyyah, 2025; Fachrani et al, 2024; Nilawati et al, 2023; Agustang et al, 2023). Kesenjangan inilah yang menjadi celah bagi penelitian ini untuk mengisi ruang kajian yang belum banyak disentuh, sehingga penelitian ini tidak bersifat pengulangan dari kajian-kajian sebelumnya.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis kebijakan politik formal pemerintah Republik Indonesia dengan peran aktor non-negara seperti pesantren, madrasah, dan organisasi Islam dalam satu kerangka periodisasi yang jarang

dikaji secara utuh, yaitu masa kedatangan Sekutu dan NICA tahun 1945-1949. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan struktural seperti pembentukan Kementerian Agama, tetapi juga mengaitkannya dengan ketahanan kelembagaan pendidikan Islam di tingkat akar rumput, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana pendidikan Islam mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan politik kolonial yang belum sepenuhnya berakhir. Kebaruan ini pada akhirnya bermuara pada kontribusi terhadap pemahaman sejarah pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan semangat Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas, khususnya dalam aspek pelestarian akses pendidikan di tengah situasi krisis dan konflik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan Islam mampu bertahan di tengah instabilitas politik, sebagai pembelajaran historis yang relevan bagi penguatan ketahanan sistem pendidikan di masa kini, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan konflik atau krisis kelembagaan. Pemahaman mendalam terhadap strategi adaptif pemerintah dan masyarakat sipil keagamaan pada masa lalu dapat menjadi rujukan penting bagi perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan pada masa sekarang. Urgensi ini sejalan

dengan tujuan SDGs poin ke-4 mengenai pendidikan berkualitas dan poin ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, karena penelitian ini memberikan bukti historis bahwa kelembagaan pendidikan berbasis masyarakat mampu menjadi instrumen ketahanan sosial di tengah guncangan politik, sebuah pelajaran yang tetap relevan bagi penguatan sistem pendidikan nasional yang tangguh terhadap krisis di masa mendatang.

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan politik pendidikan Islam yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya melalui pembentukan Kementerian Agama, dalam merespons tekanan politik dan ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran Sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) pada periode 1945-1949.

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan bagaimana peran pesantren, madrasah, serta organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Perti dalam mempertahankan dan memperkuat keberlangsungan pendidikan Islam di tengah tekanan politik dan kondisi militer yang tidak stabil pada masa transisi kekuasaan pasca-kemerdekaan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah (historical research), yang dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengungkapan dan rekonstruksi peristiwa masa lampau terkait kebijakan politik pendidikan Islam pada masa kedatangan Sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dalam rentang waktu 1945-1949. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber primer berupa dokumen dan arsip kebijakan pendidikan serta keagamaan pada masa awal kemerdekaan, dan sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kebijakan pendidikan Islam, dinamika politik pasca-Proklamasi, dan peran lembaga pendidikan Islam pada periode tersebut. Seluruh sumber ditelusuri secara sistematis untuk memastikan cakupan data yang cukup guna menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun seluruh sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian kebijakan politik pendidikan Islam pada masa Sekutu dan NICA. Tahap kritik sumber diterapkan untuk menguji keaslian dan kredibilitas data melalui kritik eksternal dan internal, sehingga hanya sumber yang valid

dan relevan yang digunakan dalam pembahasan. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara dinamika politik dengan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang berkembang pada masa itu, khususnya dalam menjawab bagaimana kebijakan formal pemerintah dan peran lembaga pendidikan Islam saling berkelindan di tengah tekanan politik. Tahap terakhir, historiografi, dilakukan dengan menyusun seluruh temuan ke dalam narasi ilmiah yang sistematis dan runtut, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan politik pendidikan Islam pada masa Sekutu sesuai dengan kerangka permasalahan yang telah dirumuskan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Politik Pendidikan Islam yang Dirumuskan dan Dijalankan Pemerintah Republik Indonesia dalam Merespons Tekanan Sekutu dan NICA (1945-1949)

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia menghadapi situasi politik yang sangat rumit dengan kedatangan pasukan Sekutu yang membawa kepentingan Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Dalam kondisi tersebut, pendidikan Islam berada dalam posisi rentan karena madrasah dan pesantren kerap dipandang oleh pihak kolonial sebagai basis potensial perlawanan nasional, sehingga menghadapi

pengawasan ketat hingga ancaman pembubaran. Menghadapi tekanan ini, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis yang paling monumental, yaitu pembentukan Kementerian Agama pada Januari 1946. Pembentukan kementerian ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan sebuah pernyataan politik yang menegaskan bahwa negara secara resmi mengakui pendidikan Islam sebagai bagian integral dan setara dalam sistem pendidikan nasional, di tengah upaya Sekutu dan NICA menghidupkan kembali corak pendidikan kolonial yang cenderung meminggirkan pendidikan keagamaan.

Melalui Kementerian Agama, pemerintah merumuskan sejumlah kebijakan konkret yang saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan pertama adalah pemberian pengakuan formal terhadap madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah dan memiliki legitimasi hukum, sehingga lembaga-lembaga tersebut tetap dapat beroperasi secara resmi meskipun berada di wilayah yang didominasi kekuatan Sekutu maupun Belanda. Kebijakan kedua berupa penyusunan dan standarisasi kurikulum pendidikan Islam, di mana pemerintah berupaya mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum agar lulusan madrasah mampu bersaing dengan sekolah negeri yang masih menggunakan corak kurikulum Barat. Kebijakan ketiga adalah pemberian dukungan tenaga pendidik dan pendanaan, meski dalam skala yang sangat terbatas mengingat kondisi ekonomi negara yang baru berdiri dan minimnya kontrol pemerintah pusat atas

wilayah-wilayah yang masih dikuasai Sekutu dan NICA. Ketiga kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasinya tidak dapat berjalan merata di seluruh wilayah akibat instabilitas keamanan dan keterbatasan sumber daya, arah kebijakan pemerintah secara konsisten diarahkan untuk melindungi eksistensi pendidikan Islam dari upaya dominasi sistem pendidikan kolonial, sekaligus meletakkan fondasi hukum dan kelembagaan yang akan menjadi rujukan bagi kebijakan pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya.

2. Peran Pesantren, Madrasah, dan Organisasi-Organisasi Islam dalam Mempertahankan dan Memperkuat Pendidikan Islam di Tengah Tekanan Politik dan Kondisi Militer yang Tidak Stabil

Di tengah keterbatasan kebijakan formal pemerintah yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, pesantren tampil sebagai kekuatan penopang utama keberlangsungan pendidikan Islam. Sebagai institusi pendidikan tertua di Nusantara, pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan formal dan informal, tetapi juga berperan sebagai tempat perlindungan bagi guru, santri, dan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kyai, sebagai figur sentral pesantren, mengambil peran ganda: mendidik generasi muda dalam bidang keagamaan sekaligus mengarahkan mereka untuk memahami pentingnya mempertahankan identitas dan

kedaulatan nasional. Banyak pesantren yang secara aktif menjadi basis kegiatan sosial-politik, termasuk pengorganisasian bantuan logistik bagi para pejuang dan penyebaran informasi perjuangan kepada masyarakat luas, sehingga fungsinya melampaui ranah pendidikan semata menuju konsolidasi sosial dan pergerakan.

Madrasah, meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan tenaga pengajar yang jauh lebih berat dibandingkan pesantren, tetap berupaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar di wilayah-wilayah yang minim dukungan pemerintah akibat dominasi Sekutu. Madrasah berfungsi menanamkan nilai religius sekaligus nasionalisme secara bersamaan, membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan agama tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Peran ini kemudian diperkuat oleh keberadaan organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang masing-masing memiliki kontribusi khas namun saling melengkapi. Nahdlatul Ulama mengandalkan jaringan pesantrennya yang luas untuk memberikan dukungan moral dan materiil bagi lembaga pendidikan dan masyarakat terdampak konflik, sementara Muhammadiyah menekankan pengembangan madrasah modern dengan kurikulum yang memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum. Persis dan Perti turut aktif membina madrasah dan sekolah Islam yang

berorientasi religius-nasionalis. Kombinasi peran organisasi-organisasi ini bersifat tidak hanya edukatif, tetapi juga politis dan simbolik, karena dengan tetap menjalankan aktivitas pendidikan di tengah tekanan, mereka secara langsung menunjukkan perlawanan terhadap upaya Belanda menghidupkan kembali sistem pendidikan kolonial yang sekuler. Dengan demikian, ketahanan pendidikan Islam pada periode 1945-1949 bukan semata hasil dari kebijakan negara, melainkan buah dari sinergi antara kebijakan formal pemerintah dan kekuatan swadaya masyarakat keagamaan yang terkonsolidasi melalui pesantren, madrasah, dan organisasi Islam.

D. Kesimpulan

Kebijakan politik pendidikan Islam pada masa kedatangan Sekutu dan NICA (1945-1949) menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia mampu merumuskan langkah strategis di tengah tekanan politik yang berat, ditandai dengan pembentukan Kementerian Agama pada 1946 sebagai pengakuan formal negara terhadap madrasah dan pesantren. Melalui pengakuan kelembagaan, standarisasi kurikulum, dan dukungan tenaga pendidik meski terbatas, kebijakan ini berhasil meletakkan fondasi hukum bagi integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ketahanan kelembagaan pendidikan dapat terbangun bahkan di tengah

krisis politik dan kekosongan otoritas yang stabil.

Peran pesantren, madrasah, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Perti menjadi kekuatan penopang yang menjaga keberlangsungan pendidikan Islam secara mandiri di tengah keterbatasan jangkauan kebijakan pemerintah. Sinergi antara kebijakan negara dan swadaya masyarakat keagamaan ini menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif dan tangguh terhadap krisis dapat terwujud melalui kolaborasi lintas aktor, sejalan dengan semangat SDGs poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan poin ke-16 tentang kelembagaan yang tangguh. Pembelajaran historis ini tetap relevan sebagai rujukan penguatan sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang et al. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijaksanaan." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 3 (2023): 287–301.
<https://doi.org/10.58540/pijar.v1i3.357>.
- Amin et al. "Peran Pesantren Dalam Melawan Penjajah Barat Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 4 (2023): 228–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2429>.
- Bella et al. "Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah." *Jurnal Inofatif Manajemen Pendidikan Islam* 03, no. 01 (2024): 52–62.
<https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>.
- Creswell. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Mrthods Approaches)*. 5th ed. Singapore: Sage Publications, 2018.
- Fachrani et al. "Departemen Agama Dan Pengmbangan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2024): 769–76. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.14486664>.
- Iskandar et al. "Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan ; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan." *Journal of Education and Religious Studies* 02, no. 02 (2022).
- Khairiyyah, Aidah. "Pendidikan Agama Islam Indonesia Pra Kemerdekaan Kebijakan Politik Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 04, no. 05 (2025): 1–6.
- Musadad. "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Jurnal Thaqaifiyyat* 20, no. 1 (2021): 1–23.
- Nilawati et al. "Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2,

no. 1 (2023): 108–15.
<https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492>.

Sari et al. “Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Di Indonesia.” *Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): 199–214.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.

Tharaba. “Pesantren Dan Madrasah Dalam Lintasan Politik Pendidikan Di Indonesia.” *Journal of Educational Management* 2, no. 2 (2020): 136–48.